

# **FAKTOR- FAKTOR PENDORONG PENGGUNAAN ISLAM MODERAT SEBAGAI IDENTITAS BARU POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2004-2014**

**Oleh: Andi Purwono**

**Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang**

## **Abstrak**

*This research aims to answer the reasons why did Susilo Bambang Yudhoyono's government in 2004-2014, using Islam as identity in Indonesia foreign policy. Before this period, Islam had never been expressed in Indonesia foreign policy. Leader like Soekarno and Soeharto tried to keep Indonesia foreign policy from islamic influence. Using qualitative method and Albert Hourani theoretical analysis, this research found that there are three reasons of this. First, Islam has been used to justify SBY policy. Second, to mobilize domestic support, and three, to reach international support and Indonesia image.*

**Keywords: foreign policy, Islam, identity, domestic support, international image**

## **Pendahuluan**

Di dunia muslim, ada harapan, kalau bukan asumsi bahwa ajaran Islam besar pengaruhnya dalam kehidupan politik termasuk politik luar negeri. Harapan ini bisa dipahami karena Islam berperan sebagai sumber nilai dan norma yang menuntun perilaku dan kehidupan masyarakat. Selain itu, Islam juga penting dalam legitimasi sosial dan politik dalam masyarakat.

Asumsi dan harapan yang sama juga muncul dalam politik luar negeri Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia diharapkan berperan lebih besar dalam berbagai konflik Timur Tengah. Indonesia diharapkan menjadi model alternatif Islam.

Namun mayoritas peneliti berpandangan bahwa Islam bukan merupakan elemen penting hubungan luar negeri Indonesia. Mayoritas studi politik luar negeri Indonesia di era Soekarno, Soeharto, dan bahkan reformasi menunjukkan hal itu. Mereka mengungkapkan bahwa Islam tidak memainkan peran signifikan apalagi dominan dalam politik luar negeri Indonesia. Islam bukan merupakan konsideran utama dan perannya sekunder saja dalam politik luar negeri Indonesia. Tidak ada substansi Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Pemerintah menghindari penggunaan identitas Islam dan berupaya agar politik luar negeri tidak dictated oleh Islam. Bahkan dari sisi retorika dan jargon, identitas Islam tidak pernah muncul dalam politik luar negeri Indonesia.

Perubahan terlihat ketika artikulasi identitas Islam muncul dan disebut sebagai pola baru dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesian Council on World Affairs (ICWA) tanggal 19 Mei 2005 di Jakarta, yang merupakan pidato perdana mengenai direksi politik luar negeri Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut identitas keislaman menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Hal itu juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam forum utama ekonomi dunia Group of 20 (G20).<sup>2</sup> Sebagai kelanjutan, Indonesia terus berupaya memasukkan Islam moderat sebagai *image*-nya dalam politik global.<sup>3</sup> Bahkan sebenarnya Islam moderat ini sudah dimulai sejak Bom Bali I 2002 dan menjadi salah satu prioritas politik luar negeri SBY.<sup>4</sup>

Indonesia memang serius dalam upaya memasukkan Islam moderat sebagai identitas barunya dalam politik global. Identitas baru Indonesia Islam moderat ini telah mendapat apresiasi luar negeri.<sup>5</sup> Program- program yang dijalankan meliputi fasilitasi *interfaith dialogues*, *inter-civilization dialogues*, dan menjadi tuan rumah *the International Conference of Islamic Scholars* yang berupaya mempromosikan aspek moderat peradaban Islam. Agenda- agenda itu diorganisasikan di bawah supervisi Direktorat Diplomasi Publik kementerian Luar Negeri.<sup>6</sup> Dua hal yang sering juga disebut adalah upaya Indonesia menjadi jembatan Islam- Barat serta jembatan antar dunia Islam. Setelah sekian lama sejak kemerdekaan hingga awal era reformasi tidak dijadikan identitas dan bahkan dihindari, mengapa akhirnya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diartikulasikan Islam sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia ?

---

<sup>1</sup> Lihat Yudhoyono, S. B. 2005, 'Independent and Active Foreign Policy in the 21<sup>st</sup> Century', *Transforming Indonesia: Selected International Speeches* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005), p. 124-125.

<sup>2</sup> "...as the G-20 has confirmed itself for the status of the major forum on world economic issues, Indonesia is challenged to carve a niche within the group that is unique to itself as the world's third largest democracy, the country with the world's largest Muslim population, and a voice of moderation..." Lihat Anwar, D. F. 2011, 'The Impact of Domestic Politics and Asian Regional Affairs on Indonesian Foreign Policy', *Southeast Asian Affairs*, p. 126.

<sup>3</sup> Rizal Sukma, Domestic Politics and International Postures: Constraints and Possibilities dalam A. Reid, *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (Singapore, ISEAS, 2012), h. 86.

<sup>4</sup> D. Weatherbee, *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality* (Singapore: ISEAS, 2013)

<sup>5</sup> Lihat Tabloid Diplomasi Edisi Maret 2009.

<sup>6</sup> Tim Kementerian Luar Negeri RI, *Buku Saku Diplomasi Publik* (Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, 2008).

## Teori dan Pembahasan

Dalam studi tentang Islam dalam politik luar negeri, tulisan Adeed Dawisha banyak dijadikan rujukan penting.<sup>7</sup> Menurutnya analisa Islam sebagai pengaruh terhadap kebijakan harus diletakkan secara hati- hati. Sebagai pengaruh ia bisa berupa kapasitas ketika berfungsi sebagai kekuatan pembuat integrasi, sebagai pencipta konsensus terhadap tujuan kebijakan luar negeri, atau mobilisator sumberdaya eksternal dalam mendukung negara, serta sebagai pembatas atau kendala.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya, Islam juga tidak monolit tetapi ada banyak warna. Oleh karenanya memang sulit untuk mendefinisikan Islam, meski tetap harus diakui bahwa ada ideologi yang bernama Islam yang memiliki nilai simbolik di antara orang- orang yang menyebut dirinya muslim. Oleh karenanya, pembuat kebijakan di negara berpenduduk mayoritas muslim, harus memasukkan Islam sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. Pada tingkat analisa ini, bisa diasumsikan bahwa Islam harus terwakili dalam sebagian image dan persepsi bahkan tindakan dan sistem nilai para pembuat kebijakan. Meski demikian hal itu memang tidak menjelaskan seberapa relevan Islam dalam kebijakan tertentu. Tetapi hal itu bukan menjadi persoalan karena memang upaya mengidentifikasi faktor bukanlah melacak pengaruh faktor tersebut.

Ada ambiguitas metodologis dalam studi Islam dalam politik luar negeri yaitu adanya kesulitan dalam menentukan apakah Islam itu bertindak sebagai *motivator*, *legitimator* atau sekedar *justifier* bagi kebijakan luar negeri tertentu.<sup>9</sup> Dengan demikian problem metodologisnya ada dua yaitu bagaimana memisahkan Islam dari nilai lain yang juga memberi motivasi, dan kedua, bagaimana memisahkan Islam sebagai motivator kebijakan atau sebagai peran fungsional lainnya. Sayangnya, disiplin hubungan internasional tidak secara saintifik bisa tepat dalam mengatasi kesulitan- kesulitan ini. Pada akhirnya, pada analisis itu sendiri berdasar keahlian dan pengetahuannya untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Upaya mengisolasi Islam dari nilai lain agar ditemukan ketepatan tentang peran fungsionalnya biasanya tergantung pada referensi pembuat kebijakan. Namun hal itu juga memuat sejumlah problem.

Oleh karenanya yang bisa dilakukan adalah secara sederhana menempatkan Islam dalam bahasa dan simbol yang digunakan para pembuat kebijakan.<sup>10</sup> Namun menurutnya hal

---

<sup>7</sup> Adeed Dawisha, Some Methodological Issues dalam Adeed Dawisha (ed.), *Islam in Foreign Policy* (New York: Cambridge University Press, 1983), h. 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 6.

ini juga beresiko. Bukan karena tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa Islam memotivasi pembuat kebijakan, namun karena ada kemungkinan besar Islam sekedar digunakan oleh mereka untuk melegitimasi pemerintahannya atau memobilisasi dukungan bagi kebijakannya.

Pendapat yang serupa disampaikan Hourani yang menyebutkan tiga pertanyaan yang biasanya muncul dalam kajian Islam dan politik luar negeri dan menyatakan pertanyaan ketiga tentang bahasa dan simbol penguasa lah yang paling memuaskan jawabannya.<sup>11</sup> Meskipun demikian, ia mengakui bahwa perbedaan antara ketiga pertanyaan itu terkadang artifisial saja dan jawaban terhadap salah satu pertanyaan bisa jadi berkaitan dengan pertanyaan lain.

Pertama, sejauh mana Islam bisa memberi arah dan isi politik luar negeri dimana mayoritas penduduknya muslim. Opini umum yang berkembang adalah bahwa hanya pada isu terbatas saja, negara dengan populasi muslim membuat politik luar negeri yang berbeda dengan negara lain seperti isu Palestina dan Jerusalem. Selain isu itu, hanya Iran lah negara yang bisa disebut menerapkan “politik luar negeri Islam” secara penuh. Hal ini disebabkan karena kombinasi faktor peran spesial kelas agama di masyarakat Iran dan cara revolusi Iran diproyeksikan ke dalam kekuasaan politik.

Pertanyaan kedua adalah sejauh mana pandangan negara terhadap dunia dibentuk oleh nilai sosial dan politik budaya Islam. Meski tidak selalu nilai itu didefinisikan dalam tujuan kebijakan, nilai- nilai itu bisa mempengaruhi metode- metode atau menentukan batas mana yang mungkin untuk dilakukan. Di negara- negara dengan penduduk muslim, budaya pra-Islam bisa dihapus atau diserap dalam sistem budaya yang pada akhirnya bisa disebut secara esensi sebagai Islam. Di situ, Islam sering berperan sebagai jalan mengidentifikasi kawan alami sehingga Islam menjadi jalan potensial dalam membentuk blok negara- negara.

Namun perlu dicatat juga bahwa nilai Islam itu bukannya tidak mendapat tantangan. Ada nilai lain seperti sekularisme, urban, industri, dan lainnya yang juga mempengaruhi hidup dan pikiran para *decision makers*. Artinya ada problem membedakan nilai Islam dengan pengaruh nilai lain. Akibatnya seringkali pembedaan antara negara muslim dan non muslim menjadi tidak relevan.

Ketiga, sejauh mana pemerintah menggunakan term dan simbol Islam untuk menjelaskan dan menjustifikasi kebijakannya terhadap rakyatnya. Pertanyaan ketiga ini lah

---

<sup>11</sup> Albert Hourani, Conclusion dalam Adeed Dawisha (ed.), *Islam in Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), h. 178-181.

yang tampaknya lebih menemukan jawaban. Kita memang melihat banyak pemimpin Islam menggunakan lebih dibanding era sebelumnya.

Ada tiga penjelasan untuk hal ini yaitu pertama, penggunaan simbol Islam ditujukan sebagai cara alami para pembuat kebijakan mengekspresikan diri atau agar bisa menjustifikasi kebijakan mereka dalam pikiran mereka. Kedua untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Ketiga untuk menarik rakyat di negara lain melalui pikiran para pemimpinnya.<sup>12</sup>

Riset ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Jika pengertian pertama lebih mengacu pada strategi penelitian, maka pengertian kedua lebih pada hasil penelitian

Temuan penelitian tentang faktor- faktor pendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengartikulasikan Islam sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia meliputi tiga variabel berikut.

Pertama, penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri bisa ditujukan sebagai cara alami para pembuat kebijakan untuk mengekspresikan diri atau agar bisa menjustifikasi kebijakan mereka dalam pikiran mereka. Artinya, ada dorongan internal dari nilai yang diyakini pembuat kebijakan. Islam moderat yang dijadikan identitas politik luar negeri Indonesia itu dalam kaitan ini adalah dorongan dari pemikiran, keyakinan, nilai yang dianut mereka.

Pertama, selain dikenal sebagai jenderal pemikir, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya adalah santri yang lahir di lingkungan pesantren sehingga sangat akrab dengan syariat, nilai dan hakikat keislaman.<sup>13</sup> Meski lebih tampak sebagai sosok militer, namun dari tulisan dan pikirannya, kita bisa membaca keluasan dan kedalaman pengetahuan keislamannya. Oleh karena itu pada aspek idiosyncrasy ini kita melihat ada rasa tanggung jawab SBY sebagai pemimpin dari negara berpenduduk muslim terbesar untuk bersikap terhadap situasi internasional yang dipenuhi isu terorisme berbasis agama.

Kedua, hal senada juga tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri. Sebagai respon dari keadaan internasional yang terus menyudutkan Islam sebagai agama radikal, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyampaikan responya dengan memaparkan bahwa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Dino Patti Djalal, *Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY* (Jakarta: Red and White Publishing, 2008), h. 184-195.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk memproyeksikan wajah Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang moderat.<sup>14</sup> Artinya ada kesadaran bahwa sebagian perilaku muslim tidak mencerminkan ajaran Islam. Di sisi lain ada pandangan yang keliru dengan memandang Islam sama dengan perilaku sebagian muslim. Oleh karenanya, ada perasaan kewajiban dari pemimpin Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya ajaran Islam yang sebenarnya.

**Kedua**, penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Artinya ini adalah mekanisme politik di tingkat domestik dengan dua tujuan yaitu menarik dukungan bagi kebijakan. Tujuan berikutnya untuk meraup legitimasi bagi kebijakan yang dibuat agar tidak muncul penentangan.

Pertama, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Islam Indonesia memang moderat dan organisasi Islam *mainstream* Indonesia juga moderat. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang damai, kontribusi organisasi- organisasi Islam dalam *nation and state building*, serta perannya dalam dinamika sejarah Indonesia makin menegaskan karakter Islam damai Indonesia.<sup>15</sup> Dengan demikian, identitas Islam moderat kompatibel dengan karakter Islam yang ada di Indonesia.

Kedua, mobilisasi dukungan rakyat dalam politik luar negeri yang mempromosikan Islam moderat juga bisa kita lihat dari upaya mengikutsertakan organisasi Islam dalam diplomasi internasional Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang menyatakan bahwa penguatan kemoderatan sebagai tema besar kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan dengan pemberdayaan kelompok moderat di dalam negeri sebagai langkah awal.<sup>16</sup> Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahwa keberhasilan memerangi terorisme ditentukan juga oleh pemberdayaan kaum moderat (*empowering moderates*)<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Hasan Wirajuda, "Refleksi tahun 2003 dan Proyeksi tahun 2004" dipaparkan di Jakarta, 6 Januari 2004

<sup>15</sup> Lihat misalnya Noor Achmad, *Kumpulan Pemikiran Lokakarya Sikap Keberagaman Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan* (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2008).

<sup>16</sup> Hassan Wirajuda, "Refleksi Tahun 2003 dan Proyeksi Tahun 2004" dalam paparan lisan yang disampaikan di Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 6 Januari 2004.

<sup>17</sup> Lihat Paparan Lisan Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda "Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005" dalam Badan Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Kemenlu, *Himpunan Pidato/ Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004* (Jakarta: BPPK Kemenlu, 2005), h. 173.

Pelibatan kelompok-kelompok moderat yang merupakan aktor non-negara menandai perubahan pola kebijakan luar negeri yang pada era sebelumnya lebih diformulasikan oleh elite daripada massa. Mereka dilibatkan untuk turut serta mempromosikan kemoderatan Indonesia melalui berbagai kegiatan diplomasi. Dalam kaitan ini, maka secara bersamaan pemerintah juga bisa disebut menggalang mobilisasi domestik sehingga mendapat dukungan.

Kerjasama dengan Nahdlatul Ulama terlihat dari penyelenggaraan serangkaian konferensi ulama dan ilmuwan muslim dalam *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) sejak 2004. Dengan Muhammadiyah misalnya dapat dilihat dari kegiatan *International Dialogue On Interfaith Cooperation* yang diselenggarakan pada Desember 2004. Pada kegiatan ini, Muhammadiyah berperan sebagai *organizing committee*. Acara yang diadakan di Jogjakarta ini dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN, New Zealand, dan Negara-negara Uni Eropa.<sup>18</sup>

**Ketiga**, mobilisasi dukungan rakyat dalam politik luar negeri yang mempromosikan Islam moderat juga bisa kita lihat dari dukungan tokoh organisasi Islam dan cendekiawan muslim moderat. Hal itu misalnya tampak dari kegiatan dialog lintas agama yang dilakukan dengan negara-negara sahabat dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh muslim seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat, cendekiawan muslim Azyumardi Azra, Ketua orosidium ICMI Marwah Daut Ibrahim, ketua PBNU Masykuri Abdullah, dan ekonom Islam Dr. M. Syafi'i Antonio.<sup>19</sup>

**Ketiga**, penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk menarik rakyat di negara lain melalui pikiran para pemimpinnya. Artinya, ini adalah upaya mendapatkan legitimasi eksternal dari masyarakat internasional. Ini adalah diplomasi untuk memenangkan hati dan pikiran (*winning the hearts and minds*) pemerintah dan publik di luar negeri agar dapat mengurangi kesalahan persepsi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dampak yang diinginkan dari hal ini tentu saja adalah citra positif Indonesia. Citra yang positif pada gilirannya akan mendorong pada kerjasama yang lebih erat dan menghindari konflik.

---

<sup>18</sup> "Dialog Antar Agama untuk Mengatasi Ketegangan Dunia", Kompas, 6 Desember 2004

<sup>19</sup> "deplu dan Lembaga Islam Indonesia promosikan islam di london", dalam <http://news.detik.com/read/2006/07/06/071444/63011/10/deplu/-lembaga-islam-indonesia-promosikan-islam-di-london> diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 00.50

<sup>20</sup> Hassan Wirajuda, *Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pidato Menteri Luar Negeri, 2006), h. 16..

Pertama, Identitas Islam moderat ditujukan untuk mendapat citra positif dalam konteks sistem internasional yang diliputi terorisme<sup>21</sup> dan Islamophobia. Runtuhnya Uni Soviet (US) yang dianggap sebagai musuh bersama menginspirasi beberapa kalangan akademisi Barat yang diwakili Samuel Huntington, Elie Kedouri, dan Bernard Lewis untuk menciptakan musuh baru bagi kedigdayaan Barat. Mereka membangun lima argumen dalam mempertentangkan peradaban Barat dan Islam: 1) nilai-nilai Islam tidak cocok dengan demokrasi dan cenderung menghambat proses demokrasi sehingga dapat mengancam demokrasi Barat; 2) Muslim kurang percaya kepada institusi politik dalam sistem demokrasi; 3) nilai-nilai Islam menjadi sumber pemerintahan autoritarian di negara-negara Timur Tengah sehingga meminimalisir partisipasi politik; 4) Muslim kurang memiliki komitmen. Hal ini menimbulkan isu Islamofobia di dunia internasional. Islamofobia diasumsikan sebagai bentuk diskriminasi, gangguan, kekerasan yang berasal dari mis informasi yang diyakini dapat mempresentasikan Islam dan pengikutnya.<sup>22</sup> Keadaan internasional seperti ini membuat negara – negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam merasa harus ambil sikap. Salah satunya Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Pasca peristiwa 11 September 2001, Amerika mengklaim bahwa peristiwa tersebut sebagai bentuk terorisme yang kemudian diimplementasikan dalam politik luar negerinya untuk memerangi terorisme (*War on Terrorism*).<sup>23</sup> Gerakan pertama yang dilakukan adalah dengan membuat *National Security Strategy* (NSS) pada tahun 2002<sup>24</sup>, yang berisikan ambisi aliansi untuk memerangi terorisme. Selanjutnya Amerika membuat *National Strategy For Combating Terrorism* (NSCT) untuk lebih menguatkan niatnya memerangi segala bentuk terorisme, hingga pada akhirnya Amerika membuat gerakan global *war on againt terrorism* untuk lebih memantapkan niatnya dalam memerangi terorisme.<sup>25</sup> Di level internasional Amerika terus berupaya menebarkan gerakan melawan terorisme.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat tulisan tentang kehadiran Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke Istana Bogor berjudul “Amerika, Bush, dan Pak Beye” oleh Wisnu Nugroho, *Pak Beye dan Politiknya* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 145- 148.

<sup>22</sup> Absus Satta Gazali. Islam and muslim in the post 9/11america. (modesto:eagleenterprise.2012). hal 19

<sup>23</sup> [file:///G:/%C2%A0/SKRIPSI/bahan%20web/bab%20II/20-9-2001%20%20Presiden%20Bush%20Kobarkan%20Perang%20Lawan%20Teroris%209\\_11%20-%20News%20Liputan6.com.htm](file:///G:/%C2%A0/SKRIPSI/bahan%20web/bab%20II/20-9-2001%20%20Presiden%20Bush%20Kobarkan%20Perang%20Lawan%20Teroris%209_11%20-%20News%20Liputan6.com.htm) diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 13.12

<sup>24</sup> Ambisi bush: satu analisis hegemoni beridiologi Gramsci.pdf dapat diliaht di <https://www.google.com/search?q=pembentukan+NSS+oleh+AS+2002&ie=utf-8&oe=utf-8> diakses pada tanggal 8 desember 2015 pukul 23.06

<sup>25</sup> Upaya – upaya Amerika Serikat memerangi terorisme [https://www.academia.edu/3372813/4.1\\_Upaya-Upaya\\_Amerika\\_Serikat\\_Dalam\\_Memerangi\\_Terorisme](https://www.academia.edu/3372813/4.1_Upaya-Upaya_Amerika_Serikat_Dalam_Memerangi_Terorisme) diakses pada tanggal 5 desember 2015 pukul 20.42

<sup>26</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5697/catatan-singkat-ruu-anti-terorisme> diakses pada tanggal 5 desember 2015 pukul 20.39

Bagi Indonesia, kondisi ini mengkhawatirkan karena muncul pemberitaan dan tuduhan masyarakat internasional bahwa Indonesia sebagai negara muslim sarang teroris. Paskabom di Bali 2002 misalnya eksekusi negatif bahkan dirasa oleh warga Indonesia di luar negeri. Organisasi Keamanan Intelijen Australia (ASIO) dan Polisi Federal Australia (AFP) dengan senjata tempur diberitakan menggeledah dengan kasar rumah-rumah warga muslim Indonesia yang tinggal di Sydney, Perth, dan Melbourne, Australia.<sup>27</sup> Selain itu, pemberitaan media, asing terutama, juga dituduh menimbulkan bias kesan tragedi Bali adalah tragedi Australia, Inggris, atau negara-negara yang warganya menjadi korban. Kesan yang juga ditonjolkan kemudian adalah kemungkinan besar keterlibatan beberapa tokoh Islam Indonesia di balik peristiwa itu. Padahal, tidak bisa dipungkiri Indonesia adalah korban sebenarnya. Biaya sosial, politik, dan ekonomi yang mesti ditanggung Indonesia sangat besar. Di bidang ekonomi, industri pariwisata nasional menerima pukulan yang telak dan pemulihannya diduga memerlukan waktu yang lama. Belum lagi sektor ekonomi lain seperti investasi asing yang mengalami kontraksi akibat stabilitas yang dianggap tidak kondusif. Di bidang politik, tekanan internasional dirasakan sangat besar agar kita bertindak lebih banyak dalam menyikapi terorisme. Di bidang sosial, kecurigaan antaranak bangsa meningkat. Berbagai dugaan dan tuduhan dalang terorisme muncul saling tumpang tindih tanpa pembuktian yang jelas. Tanpa penanganan yang komprehensif, hal ini tentu saja berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.

Kedua, bukti penggunaan Islam moderat sebagai menarik dukungan eksternal bisa dibaca dari pernyataan para pejabat kita yang menyebut Islam moderat sebagai asset diplomasi dalam pergaulan internasional.<sup>28</sup> Sejak terpilihnya Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia dalam pemilu 2004, Indonesia mencoba untuk terus lebih aktif dalam perannya di dunia internasional salah satunya merespon dunia internasional tentang isu Islamofobia, karena keadaan internasional tersebut membuat citra negatif terhadap Indonesia.<sup>29</sup> Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengembalikan citra positif negara. Model demokrasi ini ingin menunjukkan citra positif Indonesia di dunia internasional dengan mengusung tema Islam dan demokrasi di Indonesia.<sup>30</sup>

Ketiga, hal itu juga memenuhi ekspektasi publik internasional. Identitas Islam moderat yang dilakukan Indonesia juga mendapat motivasi dari Barat sebagaimana

---

<sup>27</sup> Andi Purwono, *Perlakuan Terhadap WNI di Australia*. Opini Wacana Suara Merdeka 5 Nopember 2002.

<sup>28</sup> Moehammad Shoelhi, *Diplomasi Damai* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 10.

<sup>29</sup> <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=3708> diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 14.13

<sup>30</sup> A.S. Ma'mun, *Citra Indonesia Di Mata Dunia, Gerakan Kebebasan Informasi dan Diplomasi Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Bandung, 2009, hal 212

diungkapkan Rizal Sukma yang menghadiri acara Wilton Park Conference di Inggris pada Maret 2010 bahwa masyarakat internasional mengharapkan agar Indonesia dapat memainkan peran sebagai suara Islam dunia.<sup>31</sup> Ekspektasi ini bermuara pada saran agar Indonesia Indonesia dapat menjadi mediator antara Barat dan dunia Islam. Tidak hanya itu, Islam moderat Indonesia juga diharapkan dapat menjadi model alternatif yang mungkin diterapkan bagi masyarakat muslim lainnya. Secara eksplisit, Presiden AS Barack Obama mengatakan, Indonesia sebagaimana Chile dan Korea Selatan dapat dijadikan model demokrasi yang baik bagi Mesir.<sup>32</sup> Pentingnya menangkalkan isu terorisme dengan membangun jaringan Islam moderat disadari oleh Barat dengan melihat Indonesia sebagai aktor penting terutama dikawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks itu, kegiatan dialog antar keyakinan dilaksanakan. Beberapa mitra *interfaith dialog* diantaranya dengan Inggris<sup>33</sup> dengan dasar masih berkembangnya isu terorisme yang mengatasnamakan agama. Kegiatan yang sama juga dilaksanakan dengan Kanada dengan menggelar *interfaith dialog* dengan tema toleransi dan perdamaian.<sup>34</sup> Selain itu Indonesia juga mengadakan *interfaith dialog* dengan Amerika Serikat (2010, 2012), Austria (2009, 2010), Belanda (2009), Bulgaria (2010), Ceko (2010), Ethiopia (2011), Hungaria (2010), Inggris (2008), Jerman (2010, 2011,2013), Kanada (2008), Lebanon (2008, 2011), Polandia (2011, 2013), Rusia (2009), Serbia (2011), Spanyol (2010), Uni Eropa (2010), Vatikan (2008), Yunani (2011), Chile (2012), Argentina (2012), dan Pakistan (*Intrafaith: Empowering the Moderates*, 2012).<sup>35</sup>

Di tingkat regional, Indonesia juga mengadakan *Interfaith Dialogue* diantaranya *Regional (Asia Pacific) Interfaith Dialogue* (di Yogyakarta, Cebu, Filipina, Waitangi, Selandia Baru, Phnom Penh, Perth, dan di Semarang pada tahun 2012 yang menghasilkan 'Semarang Plan of Action. Selanjutnya *The Asia-Europe Meeting (ASEM) Interfaith Dialogue* yang telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali (di Bali, Larnaca-Cyprus, Nanjing, Belanda, Seoul, Toledo, dan Manila). *Asia Pacific Inter Faith Youth Camp* (APIFYC) di Surabaya pada 2004, *APEC Intercultural and Faith Symposium* pada Oktober 2006 di Yogyakarta; dan *Asia Europe Youth Interfaith Dialogue* di Bandung pada

<sup>31</sup> Dewi Fortuna Anwar, loc. cit., hal 38-39

<sup>32</sup> Ben Smith, "Obama Suggest Indonesia, Chile as models for Egypt", Politico, 2 Maret 2011

<sup>33</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/700966-indonesia-swiss-promosikan-interfaith-dialog> diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 15.53

<sup>34</sup> <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/44-november-2008/291-bilateral-interfaith-dialogue-indonesia-kanada-dialog-mengembangkan-toleransi-dan-perdamaian.html> diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 15.56

<sup>35</sup> <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1672-indonesia-prakarsai-interfaith-dialogue.html> diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 16.12

2008.<sup>36</sup> Sedangkan diranah multilateral dilakukan dalam dua forum yaitu pada *The Non-Aligned Movement (NAM) on Interfaith Dialogue and Cooperation* dan *United Nations Alliance of Civilizations (UN AOC)*. Sementara itu pada tahun 2014, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan *'The 6<sup>th</sup> UN AOC Global Forum*.

## Penutup

Setelah sekian lama sejak kemerdekaan hingga awal era reformasi tidak dijadikan identitas dan bahkan dihindari, mengapa akhirnya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diartikulasikan Islam sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia ? Riset ini menemukan bahwa faktor- faktor pendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengartikulasikan Islam sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia meliputi tiga variabel berikut.

Pertama penggunaan simbol Islam digunakan sebagai justifikasi kebijakan. Penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri bisa ditujukan sebagai cara alami para pembuat kebijakan untuk mengekspresikan diri atau agar bisa menjustifikasi kebijakan mereka dalam pikiran mereka. Artinya, ada dorongan internal dari nilai yang diyakini pembuat kebijakan. Islam moderat yang dijadikan identitas politik luar negeri Indonesia itu dalam kaitan ini adalah dorongan dari pemikiran, keyakinan, nilai yang dianut mereka. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan presiden dan menteri luar negeri.

Kedua, penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Artinya ini adalah mekanisme politik di tingkat domestik dengan dua tujuan yaitu menarik dukungan bagi kebijakan. Tujuan berikutnya untuk meraup legitimasi bagi kebijakan yang dibuat agar tidak muncul penentangan.

Hal itu dibuktikan dari fakta bahwa Islam Indonesia memang moderat dan organisasi Islam *mainstream* Indonesia juga moderat. Selanjutnya, pemerintah mengikutsertakan organisasi Islam dalam diplomasi Islam moderat. Serta terakhir bukti dukungan tokoh Islam pada diplomasi tersebut.

Ketiga, penggunaan identitas Islam dalam politik luar negeri juga bisa ditujukan untuk menarik rakyat di negara lain melalui pikiran para pemimpinnya. Artinya, ini adalah upaya mendapatkan legitimasi eksternal dari masyarakat internasional. Ini adalah diplomasi untuk memenangkan hati dan pikiran (*winning the hearts and minds*) pemerintah dan publik di luar negeri agar dapat mengurangi kesalahan persepsi. Oleh karena itu, dampak yang

---

<sup>36</sup> [http://www.kompasiana.com/kimjongun/kekuatan-soft-power-sby\\_54f79c9ca3331141758b48ba](http://www.kompasiana.com/kimjongun/kekuatan-soft-power-sby_54f79c9ca3331141758b48ba) diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 16.03

diinginkan dari hal ini tentu saja adalah citra positif Indonesia. Citra yang positif pada gilirannya akan mendorong pada kerjasama yang lebih erat dan menghindari konflik.

Hal itu dibuktikan dengan upaya kita membendung isu terorisme dan *islamophobia* serta citra negatif terhadap Indonesia. Selanjutnya ada pernyataan resmi islam moderat sebagai asset diplomasi Indonesia. Terakhir, bukti adanya harapan masyarakat internasional agar Indonesia memerankan diri sebagai jembatan Islam dan Barat maupun menunjukkan wajah alternatif Islam yang damai.

### **Pustaka**

- Achmad, Noor. 2008. *Kumpulan Pemikiran Lokakarya Sikap Keberagaman Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan* (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Press.)
- Dawisha, Adeed. Ed. 1983. *Islam in Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge Univ. Press.)
- Djalal, Dino Patti. 2008. *Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY* (Jakarta: Red and White Publishing)
- Ma'mun. 2009. *Citra Indonesia Di Mata Dunia, Gerakan Kebebasan Informasi dan Diplomasi Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2009)
- McRae, dave. 2014. *More talk than walk: Indonesia as a foreign policy actor* (Lowy Institute for International Polity, February 2014.
- Moravcsik, Andrew. 2002. *Liberal International Relations Theory: A Scientific Assessment dalam Colin Elman and Miriam Fendius Elman, eds. , Progress in International Relations Theory* (Cambridge, MA: MIT Press, Forthcoming
- Nugroho, Wisnu. 2010. *Pak Beye dan Politiknnya* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara)
- Shoelhi, Moehammad. 2009. *Diplomasi Damai* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- ..... 2012. *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations* (University of Western Australia)
- Yudhoyono, S. B. 2005. *Transforming Indonesia: Selected International Speeches* (Jakarta: Buana Ilmu Populer).

### **Jurnal dan Tabloid**

- Ben Smith, "Obama Suggest Indonesia, Chile as models for Egypt", Politico, 2 Maret 2011
- Tabloid Diplomasi Edisi Maret 2009.

### **Koran**

- Andi Purwono, *Perlakuan Terhadap WNI di Australia*. Opini Wacana Suara Merdeka 5 Nopember 2002.

“Dialog Antar Agama untuk Mengatasi Ketegangan Dunia”, Kompas, 6 Desember 2004

### **Dokumen**

Hassan Wirajuda, “Refleksi Tahun 2003 dan Proyeksi Tahun 2004” dalam paparan lisan yang disampaikan di Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 6 Januari 2004.

Hassan Wirajuda, *Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pidato Menteri Luar Negeri, 2006)

Paparan Lisan Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005” dalam Badan Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Kemenlu, *Himpunan Pidato/ Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004* (Jakarta: BPPK Kemenlu, 2005), h. 173.

### **Internet**

<http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf-version/1672-indonesia-prakarsai-interfaith-dialogue.html> diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukul 16.12

<http://news.detik.cpm/read/2006/07/06/071444/63011/10/deplu/-lembaga-islam-indonesia-promosikan-islam-di-london>

Absus Satta Gazali. Islam and muslim in the post 9/11america.

(modesto:eagleenterprise.2012). hal 19

[file:///G:/%C2%A0/SKRIPSI/bahan%20web/bab%20II/20-9-2001%20Presiden%20Bush%20Kobarkan%20Perang%20Lawan%20Teroris%209\\_11%20-%20News%20Liputan6.com.htm](file:///G:/%C2%A0/SKRIPSI/bahan%20web/bab%20II/20-9-2001%20Presiden%20Bush%20Kobarkan%20Perang%20Lawan%20Teroris%209_11%20-%20News%20Liputan6.com.htm)

<https://www.google.com/search?q=pembentukan+NSS+oleh+AS+2002&ie=utf-8&oe=utf-8>

[https://www.academia.edu/3372813/4.1\\_Upaya-Upaya\\_Amerika\\_Serikat\\_Dalam\\_Memerangi\\_Terrorisme](https://www.academia.edu/3372813/4.1_Upaya-Upaya_Amerika_Serikat_Dalam_Memerangi_Terrorisme)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5697/catatan-singkat-ruu-anti-terorisme>

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=3708> diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.13

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/700966-indonesia-swiss-promosikan-interfaith-dialog> diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 15.53

<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/44-november-2008/291-bilateral-interfaith-dialogue-indonesia-kanada-dialog-mengembangkan-toleransi-dan-perdamaian.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 15.56

[http://www.kompasiana.com/kimjongun/kekuatan-soft-power\\_sby\\_54f79c9ca3331141758b48ba](http://www.kompasiana.com/kimjongun/kekuatan-soft-power_sby_54f79c9ca3331141758b48ba) diakses pada tanggal 7 desember 2015 pukulk 16.03



